

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku:

- Marwan, M., dan P. Jimmy, Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition (Yogyakarta: Gama Press, 2009)
- Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Adji, Indriyanto Seno Adji. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan”, 2009.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2008.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.
- Mulyadi, Lilik. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. PT. Alumni: Bandung 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter, Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Putusan Pemidanaan, Majalah Varia Keadilan, Tahun Ke XXI No. 246, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta 2006.
- Philipus M. Hadjon, Dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2011.
- Guse Prayudi, Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan Tahun XXVI No. 299 Oktober 2010.

Jurnal:

Satriya Nugraha. 2016. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Palangka Raya. Universitas PGRI.

Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani. 2020. Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Samarinda. Universitas Mulawarman.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana.

Penilikkan Harta Benda. Peratuan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958.